

Kertas Kerja Yayasan Penabulu
di Sumatera Selatan

HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN **FOREST4DEV**

**Mengungkit Efektivitas Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Bagi Pembangunan Daerah**



LATAR BELAKANG

Efektifitas pengelolaan (pemanfaatan) sumberdaya pembangunan di daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dicari solusinya secara bersama-sama oleh parapihak terkait. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia dan penggunaan anggaran pembangunan di daerah yang terjadi setiap tahun masih menyimpan pertanyaan besar tentang pengaruh dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan mendasar yang masih dihadapi masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama dari proses pembangunan itu sendiri. Bagi sebagian wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, HUTAN merupakan sumberdaya yang tersedia secara melimpah¹. Namun setelah sumberdaya ini dimanfaatkan hingga habis belum juga melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat: akses minim, tingkat kemiskinan tinggi, pengangguran, tingkat pendidikan rendah, kebutuhan air tidak terpenuhi, pengelolaan sampah dan limbah, produktivitas pertanian rendah, konflik lahan dimana-mana masih menjadi persoalan yang masih sangat mudah dijumpai di lapangan.²

Kenyataan ini mengundang pertanyaan besar: Apa yang sesungguhnya terjadi dengan strategi pengelolaan sumberdaya (hutan) kita? Salah strateginya atau salah implementasinya? Beberapa pendekatan baru terkait dengan pengelolaan sumberdaya pembangunan daerah baik melalui dorongan teknokratis maupun penguatan partisipasi masyarakat tampaknya belum mampu meningkatkan efektifitas roda pembangunan termasuk cita-cita mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan (*Sustainable Forest Resource Management*)

Sejak kebijakan tentang Perhutanan Sosial dan juga kebijakan tentang Kemitraan Konservasi pada kawasan-kawasan konservasi dicanangkan oleh pemerintah sebenarnya dapat menjadi tonggak bagi parapihak untuk bahu membahu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah/wilayah yang mempunyai sumberdaya hutan luas melalui upaya tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*).³ Hingga saat ini

¹ Sumatera Selatan mempunyai luas wilayah sekitar 91.592 km² dengan luas hutan sebanyak 3,5 juta ha. Paling tidak terdapat 563 desa di Sumatera Selatan yang berada di dalam dan di sekitar hutan dengan ribuan kepala rumah tangga hidup dalam keterbatasan akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta penghidupan yang layak.

² Dengan berbagai sumberdaya alam yang dimiliki provinsi ini masih bergulat dengan angka kemiskinan yang tinggi. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 masih pada angka 12,71 % sedangkan persentase rata-rata kemiskinan nasional hanya 9,82 persen

³ Kebijakan perhutanan sosial dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83/2016. Berdasarkan kebijakan ini Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sementara Kemitraan Konservasi diselenggarakan atas dasar Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 6 Tahun 2018. Aturan ini diterbitkan untuk mengatur tata cara kemitraan konservasi, utamanya memberikan landasan regulasi bagi pengelola Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA) dalam mengembangkan kerjasama dengan masyarakat di sekitar kawasan.

berbagai peluang pengelolaan hutan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat (terutama di sekitar kawasan hutan) belum juga terselenggara secara optimal.⁴ Kebijakan Perhutanan Sosial dan juga Kemitraan Konservasi masih ditanggapi dingin oleh pemerintah daerah, apalagi oleh pemerintah kabupaten yang telah dicabut kewenangannya dalam urusan atau sektor kehutanan. Akses terhadap sumberdaya hutan yang secara legal telah diterima oleh masyarakat belum dianggap potensi besar dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan di sekitar kawasan hutan.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa akses legal terhadap sumberdaya lahan yang sedemikian besar ini belum mampu memberikan stimulus bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk bergerak lebih lanjut? Ternyata masih banyak persoalan disana. Ijin atau legalitas pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat ternyata masih menyimpan potensi konflik yang besar baik secara vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal terkait dengan konflik antara masyarakat penerima ijin dengan “pengelola/penguasa sebelumnya”, konflik horizontal adalah terkait dengan belum adanya pembagian “jatah kelola” yang *clear and clean* antar anggota kelompok tani penerima ijin perhutanan sosial. Berbagai konflik tenurial yang terjadi di dalam kawasan hutan inilah yang menjadikan tata kelola hutan menjadi sulit menemukan rel progresifitasnya, bukan saja dalam konteks pengembangan Perhutanan Sosial namun juga pada aspek pengelolaan hutan yang lain termasuk penanggulangan kebakaran hutan, dan juga program-program rehabilitasi lahan.

“Keinginan mulia” pemerintah pusat untuk memberikan akses sumberdaya hutan kepada masyarakat demi kesejahteraan mereka ternyata masih menjumpai berbagai batu sandungan di tingkat lapangan. Tentu hal ini adalah tantangan bukan saja bagi pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah yang mempunyai kepentingan langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks ini maka pembangunan/pengelolaan hutan seharusnya bukan lagi dipandang sebagai sekedar menanam kembali hutan yang gundul atau memanen tegakan hutan yang masih ada, pengelolaan hutan saat ini dan di masa depan adalah agenda menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan sosial.

Konteks mensejahterakan masyarakat (meskipun ada di kawasan hutan) bukan hanya domain pihak-pihak yang bergerak di sektor kehutanan atau para rimbawan saja. Sumberdaya dan anggaran sektor kehutanan sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan tantangan peningkatan

⁴ Hingga awal tahun 2020 paling tidak tercatat lebih dari 130 ijin perhutanan sosial di Sumatera Selatan yang meliputi lebih dari 100.000 ha kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat dengan berbagai skema. Program ini melibatkan sekitar 16.000 KK yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan.

kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang baik. Dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang nyata di lapangan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten hingga pemerintah desa untuk mengukir prestasi tata kelola hutan yang lestari dan mensejahterakan. Potensi parapihak atau mitra pembangunan juga perlu dioptimalkan melalui ruang-ruang sinergi dan koordinasi, sehingga inisiatif para mitra pembangunan baik dari swasta maupun dari NGO mampu mempengaruhi efektivitas pengelolaan sumberdaya hutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hutan Untuk Kesejahteraan (FOREST4DEV) adalah visi Yayasan Penabulu untuk menjalin sinergi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan tata kelola hutan demi meraih cita-cita pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengelola hutan yang baik, lestari dan berkeadilan sosial maka akan membantu pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meraih target-target *Sustainable Development Goal's* (SDG's). Yayasan Penabulu berharap visi Hutan Untuk Kesejahteraan (FOREST4DEV) ini juga menjadi visi pemerintah daerah dimana Yayasan Penabulu menjalankan aktivitasnya.

TUJUAN FOREST4DEV

Pengembangan inisiatif ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Membangun perspektif perubahan, kebaruan, dan kemanfaatan (*continuous improvement*) bersama-sama stakeholders di semua tingkatan dalam mewujudkan *Sustainable Forest Management* sebagai bagian dari pencapaian SDG's.
2. Membangun *learning site* terhadap penanganan berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk "Laboratorium Kemitraan Hutan Untuk Kesejahteraan" di tingkat tapak yang mempunyai visi jangka panjang.

OUTPUT

- Terbangunnya model-model kemitraan-tematik yang efektif pada tapak-tapak yang telah ditetapkan sebagai wujud kontribusi inovasi Yayasan Penabulu bagi Sumatera Selatan
- Dihasilkannya dokumentasi dalam frame *Story of Change* untuk setiap inisiatif yang dikembangkan.
- Terbangunnya Komunitas Perubahan yang berasal dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan

MANFAAT YANG DIHARAPKAN

- Meningkatnya sinergi tata-kelola sumberdaya mulai dari desa hingga provinsi

- Berkurangnya konflik sosial dalam pengelolaan sumberdaya hutan
- Meningkatnya kesejahteraan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) masyarakat di sekitar kawasan hutan.

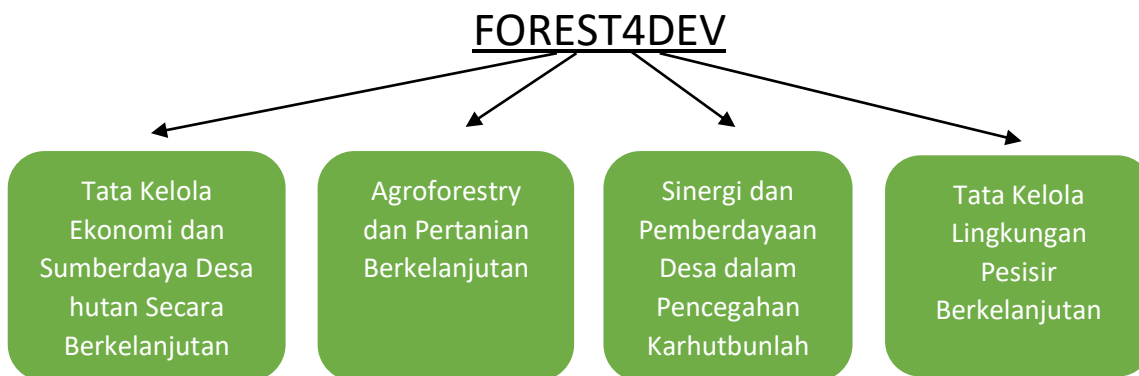
STRATEGY PENGEMBANGAN

Untuk menjalankan program ini Yayasan Penabulu akan mengembangkan beberapa strategi berikut ini:

- Menentukan beberapa lokasi sebagai *learning* “Laboratorium Kemitraan Hutan Untuk Kesejahteraan”
- Mengembangkan jaringan pembelajaran dan dialog dengan pendekatan ***Continuous Evidence-Based Learning And Improvement Process***
- Mengembangkan media komunikasi dan kampanye HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN (FOREST4DEV)

PENGEMBANGAN MODEL DI TINGKAT TAPAK

Untuk visi diatas Yayasan Penabulu telah merintis pengembangan beberapa inovasi Model Tapak Kemitraan Hutan Untuk Kesejahteraan di wilayah Kabupaten MUBA, Kabupaten Banyuasin dan juga Kabupaten Lahat. Model Tapak Hutan Untuk Kesejahteraan yang ang telah dirintis oleh Yayasan Penabulu adalah sebagai berikut:



Secara ringkas tujuan dari pengembangan beberapa model di tingkat tapak diatas dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

<i>Tema Model Tapak</i>	<i>Tujuan Khusus</i>	<i>Lokasi</i>	<i>Parapihak</i>
<i>Tata Kelola Ekonomi dan Sumberdaya Desa Hutan Secara Berkelanjutan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sinergi antara pengelolaan hutan dan pihak-pihak lain di tingkat desa • Membangun model sinergi antara KPH-Pemdes-KTH-BUMDesa • Membangun data sumberdaya dan kewilayahan di tingkat desa • Membangun sinergi tata kelola antar desa 	Kabupaten Lahat, Kecamatan Kota Agung dan Mulak Ulu	Pemdes, Kelompok Tani, Dinas Kehutanan, KPH Semendo, Dinas Pertanian,
<i>Agroforestry dan Pertanian Berkelanjutan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat khususnya petani hutan dan di sekitar kawasan hutan • Mengembangkan pola budidaya pertanian terpadu-berkelanjutan • Menambah dan memperkaya referensi komoditi bagi petani 	Desa Lubuk Bintialo, Desa Muara Medak, Kab. MUBA, Desa Sumber Rejeki dan Tabalajaya Kab. Banyuasin	Gapoktan, Pemerintah Desa, KPH, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Peternakan, Dinas PMD

*Sinergi dan
Pemberdayaan
Desa dalam
Pencegahan
Karhutbunlah*

- Meningkatkan perhatian para pihak terhadap upaya pencegahan daripada upaya pemadaman
- Meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya pencegahan karhutlah
- Meningkatkan efektifitas penanganan karhutlah

Desa Muara Medak. Kecamatan Bayunglencir, MUBA

Repair, Pemdes, Kecamatan, KPH Lalan Mendis, Dinas Kehutanan, Litbang Kehutanan, Manggala Agni, Perusahaan di sekitar Desa Muara Medak

*Tata Kelola
Lingkungan
Pesisir
Berkelanjutan*

- Mengembangkan Pemukiman Yang Ramah Lingkungan di Kawasan Pesisir Sungsang
- Mengembangkan alternatif sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir
- Meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan dan budaya setempat
- Menjalin sinergi antara masyarakat dan pengelolaan kawasan konservasi (TN Sembilang)

Kecamatan Banyuasin II

Kantor Kecamatan, Pemdes, Perkimtan, Dinas Lingkungan Hidup, Rumah Budaya Sungsang, Yayasan DEPATI

Tata Kelola Ekonomi dan Sumberdaya Desa Hutan Secara Berkelanjutan

Latar Belakang

Di Sumatera Selatan, terdapat 967 Desa yang berada di dalam dan ditepi kawasan hutan, 7 diantaranya di dalam kawasan hutan.⁵ Dan ini merupakan 30% dari jumlah desa di Sumatera Selatan. Diperkirakan terdapat 124.050 Rumah Tangga dan 454.491 Jiwa hidup di sekitar kawasan hutan di Sumatera Selatan.⁶ 29.651 Rumah Tangga (24%) mengelola lahan didalam kawasan hutan dan 946 (1%) dari Rumah Tangga di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan berpindah.⁷ Yang menarik adalah dari hasil survey yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa hanya 14,27% masyarakat di sekitar hutan yang melakukan aktivitas terkait dengan kehutanan.

Berdasarkan data diatas secara faktual banyak sekali jumlah desa yang berada di sekitar kawasan hutan, dan ternyata aktivitas (ekonomi) masyarakat tidak banyak terkait dengan keberadaan sumberdaya ini. Kemudian pada kurun waktu 4 tahun terakhir pemerintah mempunyai inisiatif untuk membuka akses legal yang luas terhadap pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat sekitar hutan melalui kebijakan/program Perhutanan Sosial⁸. Jika hal ini dipadukan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan Desa dimana terdapat aspek perencanaan pembangunan di tingkat desa, Dana Desa, dan BUMDesa maka diharapkan akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya yang ada di sekitar kawasan hutan. Perencanaan desa, Dana Desa dan BUMDesa dapat menjadi faktor pendukung (penopang) bagi keberlanjutan program perhutanan sosial paska pemberian ijin kelola kawasan hutan kepada masyarakat.

Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari program *Tata Kelola Ekonomi dan Sumberdaya Desa Hutan Secara Berkelanjutan* ini adalah:

- Penguatan sinergi antara pengelolaan hutan dan pihak-pihak lain di tingkat desa
- Membangun model sinergi antara KPH-Pemdes-KTH-BUMDesa
- Membangun data sumberdaya dan kewilayahan di tingkat desa
- Membangun sinergi tata kelola antar desa

Dampak Yang diharapkan

- Menguatnya rencana pengembangan ekonomi desa hutan yang rasional berdasarkan potensi dan sumberdaya yang ada, termasuk sumberdaya hutan yang ada di wilayah desa

⁵ Identifikasi dan Analisis Desa di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019, *Jumlah Desa/Kelurahan Hasil Matching Menurut Provinsi dan Lokasi Terhadap Kawasan Hutan*, BPS.

⁶ Survey Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan tahun 2014, BPS

⁷ Ibid.

⁸ Perhutanan Sosial secara mendasar diatur dalam Permen KLHK No. 83/2016. Pada tahun 2019 pemerintah menargetkan memberikan ijin Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta ha kepada masyarakat di sekitar hutan.

- Berjalannya skema usaha berbasis masyarakat yang dijalankan oleh lembaga-lembaga ekonomi masyarakat seperti Kelompok Tani, BUMDesa ataupun koperasi.
- Munculnya sinergi antar desa dalam pengembang ekonomi masyarakat desa hutan
- Peningkatan pendapatan masyarakat khususnya dari pemanfaatan sumberdaya desa secara berkelanjutan

Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilakukan dan dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan diatas adalah:

- Pemetaan wilayah desa hutan
- Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH)
- Pendampingan BUMDesa
- Sinergi agenda antara KTH dan BUMDesa dan Pengusaha
- Koordinasi pihak-pihak terkait (Pemdes, KPH, Pemkab, Dinas Kehutanan)

Perkembangan Program

Hingga bulan Februari 2021 program Tata Kelola Ekonomi dan Sumberdaya Desa Hutan Secara Berkelanjutan telah mengalami berbagai perkembangan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemetaan batas desa di 2 desa di Kabupaten MUBA, yaitu Desa Pangkalan Bulian, Desa Lubuk Bintialo. Proses ini juga melibatkan sekitar 10 desa lainnya di Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir dan kecamatan Babat Toman
- Telah dilakukan sinergi kelembagaan antara kelompok perhutanan sosial dan BUMDesa di Desa Singapore, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat.



Agroforestry dan Pertanian Terpadu

Desa-desa di Sumatera Selatan dan juga pada umumnya desa-desa di Sumatera telah terintegrasi dengan industri sejak lama. Desa-desa merupakan pemasok bahan-bahan industri sehingga memunculkan pola tanam dan pola penggunaan lahan yang cenderung monokultur baik dan dalam skala besar. Hal ini menjadikan posisi petani sebagai garda depan dalam proses pemenuhan bahan baku seperti karet dan juga kelapa sawit. Secara ekonomi kondisi petani sangat tergantung dari harga komoditi tersebut yang cenderung monolitik, dan pada periode-periode tertentu mengguncang perekonomian petani, berapapun harga komoditi petani tidak mempunyai posisi tawar yang memadai. Dalam perspektif ini dibutuhkan alternatif jalan ataupun “persenjataan” petani yang lebih variatif, atau tidak hanya mengandalkan jurus tunggal atau komoditi tunggal. Petani perlu menambah variasi komoditi yang diusahakan untuk memperkuat pertahanan ekonominya.

Selain itu ketergantungan pada komoditi tunggal juga menyebabkan pemanfaatan sumberdaya lahan jadi kurang optimal dan cenderung tidak berkelanjutan dan miskin keanekaragaman hayati. Bahkan kita jumpai banyak fenomena dimana desa-desa tidak memproduksi bahan pangan sama sekali baik dalam bentuk bahan pangan pokok, ternak, buah maupun sayur. Resiko terhadap ketergantungan komoditi tunggal juga dapat berasal dari gangguan teknis seperti jika terjadi serangan hama/penyakit secara masal, atau terjadi kelangkaan saprotan pendukung komoditi tunggal tersebut. Keanekaragaman hayati ataupun keanekaragaman produk dan keanekaragaman komoditi perlu digalakkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Agroforestry dan pertanian terpadu merupakan salah satu langkah yang bisa dikembangkan untuk mengatasi persoalan diatas.

Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari program Agroforestry dan Pertanian Terpadu adalah:

- Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat khususnya petani hutan dan di sekitar kawasan hutan
- Mengembangkan pola budidaya pertanian terpadu, berkelanjutan dan ramah lingkungan
- Menambah dan memperkaya referensi komoditi bagi petani

Bentuk Kegiatan

Berbagai kegiatan yang telah dikembangkan dalam rangka program ini adalah sebagai berikut:

- Pembuatan Demplot agroforestry pada lahan mineral di Desa Lubuk Bintialo, Kabupaten MUBA
- Pembuatan Demplot agroforestry lahan gambut di Desa Muara Medak, Kabupaten MUBA
- Pengembangan usaha madu klulut (*stingless bee*)
- Pengembangan pertanian ramah lingkungan di beberpa desa di Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasi.

Dampak Yang Diharapkan

Dari pengembangan program ini diharapkan di masa yang akan datang akan berdampak pada:

- Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat
- Meningkatnya variasi pekerjaan seiring dengan variatifnya komoditi yang diusahakan di desa-desa hutan
- Pola pemanfaatan yang cenderung polikultur menggantikan pola yang monokultur

Perkembangan Program

Pengembangan agroforestry di dua desa di Kabupaten Musi Banyuasin ini telah mengalami perkembangan sebagai berikut:

- Kesiapan masyarakat untuk mengembangkan pola agroforestry di lahan perhutanan sosial mereka
- Terbangunnya demplot seluas 2 ha di masing-masing lokasi
- Bertambahnya variasi usaha tani masyarakat seperti: nanas, pinang, porang, dan juga jeruk.



Sinergi dan Pemberdayaan Desa dalam Pencegahan Karhutbunlah

Latar Belakang

Penyebab terjadinya karhutla, berdasarkan laporan Satgas Karhutla Sumsel 2016, bisa diidentifikasi sebagai berikut, Pertama, metode pembukaan lahan pertanian dan perkebunan yang masih mengandalkan metode pembakaran. Kedua, penelantaran lahan-lahan, terutama kawasan gambut, lahan tidak diolah dan tidak dijaga. Ketiga, tingginya suhu akibat kemarau panjang, Keempat, keringnya rawa-rawa, terutama rawa gambut, baik akibat tindakan yang disengaja atau tidak. Kelima, praktek illegal logging yang masih banyak ditemukan. Jikalau boleh ditambahkan pada konteks ini adalah ketidak efektifan penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran.

Faktor-faktor diatas adalah kejadian-kejadian yang berlangsung pada tingkat tapak dimana mekanisme monitoring melalui patroli dan sosialisasi saja tidak selalu efektif untuk mencegah munculnya hal-hal tersebut. Dibutuhkan kelembagaan di tingkat tapak/lokal sebagai ujung tombak bagi kegiatan pencegahan karhutla dimana lembaga lokal inilah yang akan berperan agar api tidak dinyalakan atau api kecil dapat ditanggulangi lebih awal. Sistem koordinasi dalam deteksi dan penanganan dini ini bisa dilakukan secara lebih efektif jika melibatkan lembaga lokal dimana informasi yang didasarkan pada data hot spot bisa langsung ditindaklanjuti melalui *ground check* secara cepat dan efisien. Dengan kata lain, jika selama ini pengendalian karhutla hanya memposisikan masyarakat sebagai faktor pendukung dengan teknikalisis istilah yang lazim berupa partisipasi maka pada konteks pencegahan sebagai paradigma baru dalam pengendalian karhutla masyarakat harus diposisikan sebagai garda terdepan dalam pencegahan kejadian kebakaran lahan dan hutan. Pencegahan tersebut tidak hanya terkait aktivitas-aktivitas teknis untuk mencegah kejadian seperti sosialisasi, patroli, dan pemadaman dini; akan tetapi harus masuk kedalam wilayah-wilayah yang mencegah kemungkinan terjadinya kejadian karhutla seperti mendorong pengelolaan lahan terlantar menggunakan mekanisme kebijakan perhutanan sosial misalnya. Permasalahan struktural yang menimbulkan kesenjangan ekonomi antara masyarakat dengan perusahaan juga harus menjadi sebuah pertimbangan dalam konteks kegiatan teknis pencegahan dimana diasumsikan bahwa peningkatan kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan, akses legal terhadap lahan hutan, inisiatif-inisiatif ekonomi berkelanjutan yang didukung oleh parapihak akan menjadi sebuah landasan yang kuat bagi penurunan resiko terjadinya kebakaran lahan dan hutan dalam perspektif yang lebih luas.

Pada tingkat tapak telah banyak terbentuk kelompok-kelompok masyarakat peduli api, pada banyak kasus didalam satu desa bisa terdapat lebih dari satu kelompok. Di Desa Muara Medak bahkan terdapat 10 Kelompok Masyarakat Peduli Api dan Kelompok Tani Peduli Api (KMPA/KTPA). Masing-masing kelompok memiliki jalur koordinasi sendiri-sendiri dengan lembaga "patron" yang memfasilitasi pembentukannya. Ada kelompok yang berafiliasi dengan dinas perkebunan, dinas kehutanan, kementrian KLHK, LSM dan perusahaan.

Masing-masing kelompok selama ini berjalan sendiri-sendiri dimana perencanaan dan realisasi kegiatannya biasanya sangat tergantung pada lembaga afiliasinya. Tidak ada koordinasi yang dibangun antar lembaga didalam wilayah desa sehingga sumberdaya yang ada tidak bisa berjalan sinergis. Hampir keseluruhan kelompok yang ada belum terintegrasi dengan lembaga formal desa sehingga aktifitas pengendalian karhutla yang dilakukan tidak berkesinambungan.

Selain itu, hampir setiap kelompok peduli api selalu terkendala terkait dengan operasional kegiatan dimana keanggotaannya yang bersifat voluntery tetapi aktivitasnya tergantung pada asupan dana dari lembaga afiliasi yang terbatas pada konteks pemadaman saja. Perlu dipikirkan mekanisme pendanaan mandiri melalui skema-skema pemberdayaan ekonomi kepada kelompok-kelompok tersebut melalui dana desa misalnya, sehingga kedepan kelompok peduli api tersebut memiliki keberdayaan internal untuk terlibat dalam pengendalian karhutla sebagai bagian dari permasalahan internal mereka alih-alih merupakan 'proyek' eksternal.

Disisi lain, realitas lapangan terkait pengendalian karhutla baik pada tahapan pencegahan, pemadaman, maupun pasca kebakaran tidak bisa lepas dari peran pemerintah desa terutama Kepala Desa yang tidak hanya memiliki otoritas formal tetapi juga kultural. Pelibatan warga, pengumpulan sumberdaya lokal dan alokasinya, termasuk pemahaman akan situasi dan faktor-faktor kunci akan menjadi lebih mudah jika desa terlibat. Keterlibatan ini harus didasari pada sebuah sistem koordinasi yang jelas dari pusat sampai ke bawah dengan memperhatikan cakupan peran, wewenang dan kapasitas yang dimiliki.

Tujuan Khusus

- Meningkatkan perhatian para pihak terhadap upaya pencegahan daripada upaya pemadaman
- Meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya pencegahan karhutlah
- Meningkatkan efektifitas penanganan karhutlah

Bentuk Kegiatan

Berbagai bentuk kegiatan telah dilakukan untuk mencapai tujuan dari program ini, diantaranya adalah:

- Membentuk lembaga koordinasi penanganan karhutlah tingkat desa
- Melakukan aksi pencegahan di tingkat tapak
- Melakukan kampanye pencegahan dalam bentuk film documenter

Dampak Yang Diharapkan

Dari inisiatif program ini dampak ke depan yang diharapkan adalah

- Semakin menguatnya isu pencegahan dibandingkan pemadaman yang terejawantahkan melalui anggaran pencegahan baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
- Meningkatnya keterlibatan dan kepedulian pemerintah desa dan kepedulian pihak-pihak supra desa terhadap peran desa dalam pencegahan karhutlah

- Terkelolanya resiko dan kerawanan bencana karhutlah secara lebih efektif dan efisien

Perkembangan Program

Perkembangan hingga saat ini adalah sebagai berikut:

- Terbentuknya organisasi penanggulangan karhutlah tingkat desa dengan nama Setya Mandiri
- Dilakukan praktek monitoring dan pembasahan sederhana
- Pembuatan film kampanye pengarusutamaan pencegahan karhutlah
- Diskusi dan dialog parapihak tentang pentingnya pencegahan karhutlah



Tata Kelola Lingkungan Pesisir Berkelanjutan

Latar Belakang

Salah satu permasalahan di Sumatera Selatan adalah terkait dengan kondisi pesisir atau muara sungai. Pesisir Sumatera Selatan khususnya di kawasan Selat Bangka atau muara Sungai Musi merupakan pusat kegiatan perikanan tangkap yang menghidupi ribuan rumah tangga nelayan maupun non nelayan. Namun kondisi perkampungan di area ini terlihat tidak tertata, tidak terurus dan akhirnya menciptakan perkampungan kumuh yang cukup luas. Adalah perkampungan Sungsang, merupakan pusat perkampungan nelayan di muara Sungai Musi. Kampung yang punya disebut-sebut punya sejarah panjang sejak masa kerajaan Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang ini menjadi cerminan terbaiknya aspek pengelolaan lingkungan hidup dalam perkembangan kehidupan masyarakat.

Perkampungan yang terdiri dari 5 desa ini menurut data resmi tahun 2018 dihuni oleh kurang lebih 23.758 jiwa penduduk atau kurang lebih sekitar 5000 Kepala Keluarga ini merupakan perkampungan yang sangat padat di kawasan pasang surut muara Sungai Musi dan pesisir Selat Bangka. Perkampungan ini tidak dilengkapi dengan sistem pembuangan sampah sehingga masyarakat membuang sampah begitu saja di area pemukiman atau pantai dan tepian laut. Lambat laun sampah plastik terlihat menumpuk di setiap pojok, lorong dan sudut pemukiman dan menciptakan pemandangan yang kumuh dan kotor. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan juga pemerintah desa hingga program ini dijalankan belum menemukan solusi tentang masalah persampahan ini. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah tidak adanya alokasi lahan untuk pembuangan akhir atau pembuangan sementara dan juga kemauan penduduk untuk mengeluarkan atau membayar biaya pengolahan sampah. Pemerintah juga terlihat masih enggan membangun infrastruktur pengelolaan sampah karena belum ada sistem pengelolaan yang tepat. Hingga tahun 2019 nampak belum ada solusi tentang penanganan permasalahan sampah di kawasan yang menjadi pusat kegiatan perikanan tangkap di Sumatera Selatan ini.

Diperlukan pendekatan dan strategi yang tepat dan mudah diterima masyarakat untuk mengatasi persoalan sampah di kawasan ini. Yayasan Penabulu-KELOLA Sendang mencoba menggagas strategi dan pendekatan. Inisiatif ini dimulai dengan diskusi awal antara anggota perangkat desa-desa yang ada di Perkampungan Sungsang dan pihak Kec. Banyuasin II pada awal bulan Agustus 2019. Diskusi ini memunculkan berbagai ide dan gagasan untuk mewujudkan Kampung Sungsang sebagai perkampungan nelayan yang bersih dan indah di masa yang akan datang. Perkampungan ini juga berbatasan langsung dengan Kawasan Taman Nasional Sembilang yang mempunyai daya tarik khusus terkait dengan fenomena migrasi burung dari kawasan Siberia (Asia Utara) yang sedang mengalami musim dingin. Diperkirakan populasi burung migran ini mencapai 70.000 an. Fenomena ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata

Tujuan Khusus

Program Tata Kelola Lingkungan Pesisir Berkelanjutan ini

- Mengembangkan Pemukiman Yang Ramah Lingkungan di Kawasan Pesisir Sumatera Selatan, khususnya di Perkampungan Sungsang
- Mengembangkan alternatif sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir

- Meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan dan budaya setempat
- Menjalin sinergi antara masyarakat dan pengelolaan kawasan konservasi (TN Sembilang) dalam mewujudkan lingkungan pesisir dan laut berkelanjutan

Bentuk Kegiatan:

Berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan lingkungan pesisir dan laut yang berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup yang sehat dan bersih
- Kampanye tentang lingkungan hidup melalui budaya lokal
- Gerakan Jumat Bersih
- Penetapan Area Percontohan Bebas Sampah
- Peningkatan peran pemuda dan wanita
- Penguatan kelembagaan dan kebijakan pemerintah desa dalam mendukung isu-isu lingkungan hidup
- Penguatan organisasi pemuda melalui Rumah Budaya Sungsang
- Penyelenggaraan Festival Perahu Nelayan Sungsang
- dll

Dampak Yang Diharapkan

Program ini dalam jangka panjang akan berdampak pada:

- Peningkatan kualitas lingkungan hidup di pemukiman masyarakat perkampungan Sungsang
- Berkembangnya Sungsang sebagai destinasi wisata
- Meningkatnya dukungan masyarakat terhadap kelestarian Taman Nasional Sembilang

Perkembangan Program

Berbagai bentuk kampanye tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat telah mampu menumbuhkan kesadaran sebagian masyarakat untuk mulai mengelola sampah rumah tangganya. Tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa memberikan banyak dukungan terhadap inisiatif pengelolaan sampah. Generasi muda bergerak sangat aktif untuk melakukan berbagai macam aksi peduli lingkungan. Hal ini terwujud melalui hal-hal berikut ini:

- Terselenggaranya kegiatan jumat bersih secara rutin
- Ditetapkannya beberapa Area Percontohan Bebas Sampah
- Tersusunnya Perdes tentang Pengelolaan Sampah
- Terbangunnya beberapa infrastruktur/sarana pengelolaan sampah secara mandiri
- Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah oleh Pemerintah Desa dan Kantor Kecamatan
- Menguatnya dukungan dari berbagai pihak: Danramil, Kapolsek, serta beberapa instansi terkait dari Pemerintah Kabupaten Banyuwasin
- Terselenggaranya Festival Perahu Nelayan Sungsang



